

Ekonomi-Politik Student Loan: Analisis Komparatif Kebijakan Kredit Pendidikan di Australia dan Malaysia

Rizqyansyah Fitramadhana

Universitas Gadjah Mada

*Corresponding author, e-mail: rizqyansyah.f@mail.ugm.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik kebijakan kredit pendidikan (*student loan*) di Australia dan Malaysia. Riset ini didasarkan atas dua rumusan pertanyaan pokok: (a) apakah ada perbedaan antara model ICL dan TBRL? (b) Bagaimana dua sistem *student loan* itu dijalankan di Australia (ICL) dan Malaysia (TBRL) serta seperti apa dampaknya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa analisis komparatif, khususnya komparasi kebijakan publik untuk menyingkap perbedaan konsep, teknis, dan implementasi dua sistem kebijakan pinjaman mahasiswa. Sumber data sepenuhnya menggunakan data sekunder dengan fokus utama pada artikel jurnal, buku, pemberitaan di media, dan laporan lembaga riset. Selain itu, peneliti ini mendayagunakan ekonomi-politik finansialisasi guna menganalisis secara kritis penerapan dan dampak dari kebijakan kredit pendidikan di Australia dan Malaysia. Temuan riset ini menunjukkan bahwa (a) terdapat perbedaan antara model ICL dan TBRL khususnya pada aspek waktu pengembalian dan batas minimum pendapatan peminjam dan (b) penerapan kredit pendidikan di Australia dan Malaysia menyebabkan finansialisasi pendidikan tinggi dan penyedotan finansial. Kebaruan penelitian ini terletak pada argumen baru yang belum dieksplorasi dalam penelitian terdahulu tentang kebijakan kredit pendidikan: munculnya kredit pendidikan merupakan bentuk finansialisasi pendidikan tinggi yang disebabkan oleh berkurangnya investasi publik negara pada sektor pendidikan (*the retreat of the state*).

Kata Kunci: Income-Contingent Loan; Student loan; Sosiologi Pendidikan; Time-Based Repayment Loan.

Abstract

This study aims to explain the practice of student loan policies in Australia and Malaysia. This research is based on two main questions: (a) Are there any differences between the ICL and TBRL models? (b) How are the two student loan systems implemented in Australia (ICL) and Malaysia (TBRL) and what are their impacts? To answer these questions, this study uses a qualitative approach in the form of comparative analysis, specifically a comparison of public policies to uncover differences in the concepts, techniques, and implementation of the two student loan policy systems. Data sources are entirely secondary data with a primary focus on journal articles, books, media reports, and research institution reports. In addition, this researcher utilizes the political economy of financialization to critically analyze the implementation and impact of student loan policies in Australia and Malaysia. The research findings indicate that (a) there are differences between the ICL and TBRL models, particularly in terms of repayment time and minimum borrower income limits, and (b) the implementation of student loans in Australia and Malaysia has led to the financialization of higher education and financial siphoning. The novelty of this research lies in a new argument that has not been explored in previous research on educational credit policy: the emergence of educational credit is a form of financialization of higher education caused by the reduction of state public investment in the education sector (*the retreat of the state*).

Keywords: Income-Contingent Loan; Student loan; Sociology of education; Time-Based Repayment Loan;.

How to Cite: Fitramadhana, R. (2025). Ekonomi-Politik Student Loan: Analisis Komparatif Kebijakan Kredit Pendidikan di Australia dan Malaysia. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 12(2), 125-137.



Pendahuluan

Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam sebuah rapat dengan pejabat perbankan pada tahun 2018, meminta bank-bank di Indonesia membuka layanan kredit pendidikan bagi mahasiswa. Saat itu, inisiatif Jokowi disambut baik oleh BTN dan BRI yang langsung bergerak menindaklanjuti permintaan Jokowi. Pada tahun 2018, BTN menandatangani perjanjian kerja sama penyediaan kredit pendidikan dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. BTN menawarkan pinjaman dengan jangka waktu lima tahun, bunga *flat* sebesar 6,5%, dan nilai plafon kredit maksimal mencapai Rp 200 juta. Untuk mengakses pinjaman tersebut, mahasiswa/I mesti memenuhi empat syarat: (a) pemohon merupakan WNI; (b) pemohon harus merupakan debitur BTN; (c) pemohon harus menjadi debitur KPR/kredit kepemilikan apartemen (KPA) minimal satu tahun; (d) memiliki riwayat pembayaran angsuran yang lancar. BRI, di sisi yang lain, menyodorkan Briguna Flexi Pendidikan sebagai kredit pendidikan bagi mahasiswa/i. Bedanya, BRI hanya menerima pinjaman dari mahasiswa/I yang berasal dari jenjang S2 dan S3. Syaratnya pun lebih sulit daripada BTN: mahasiswa/I harus menjadi karyawan tetap di instansi/perusahaan, memiliki penghasilan tetap selama masa pendidikan, dan hanya berlaku pada universitas-universitas yang telah bekerja sama dengan BRI.

Selama enam tahun berjalan, kredit pendidikan yang diinisiasi oleh BTN dan BRI tidak banyak mendapat perhatian. Selama kurun waktu dari 2018-2023, sangat jarang dijumpai pemberitaan mengenai pinjaman yang dirintis oleh dua bank tersebut. Kesunyian itu pecah pada bulan Desember 2023 setelah keramaian terjadi di media sosial Twitter (sekarang X) mengenai pinjaman *online* (pinjol) yang terjadi di Institut Teknologi Bandung (ITB). Saat itu, ada beberapa mahasiswa ITB yang tidak bisa membayar UKT tepat waktu. Sebagai salah satu alternatif, ITB menyarankan mahasiswanya untuk mengambil pinjaman mahasiswa di salah satu platform *financial technology* (fintech) bernama Danacita. Setelah ditelusuri lebih mendalam, model pinjaman yang ditawarkan oleh Danacita ternyata menggunakan sistem tenor. Artinya, Danacita akan menyerahkan sejumlah pinjaman yang kemudian harus dikembalikan oleh mahasiswa dalam waktu 6 sampai 12 bulan. Dalam kajian ekonomi, sistem ini dikenal sebagai *Time-Based Repayment Loan* (TBRL) atau *mortgage-based loan*.

Di Indonesia, kajian mengenai kredit pendidikan sebenarnya telah muncul sejak awal paruh kedua masa Reformasi. Sebagian besar penelitian itu berasal dari ilmu ekonomi yang mencoba memperkirakan kemungkinan penerapan pinjaman mahasiswa di Indonesia. Studi paling awal dilakukan oleh Bruce Chapman dan Daniel Suryadarma pada tahun 2013. Tulisan mereka yang berjudul *Financing Higher Education: The Viability of a Commercial Student Loan Scheme in Indonesia* menyimpulkan bahwa pinjaman mahasiswa akan memberatkan keluarga miskin jika model pinjaman yang diterapkan mengikuti sistem tenor (TBRL) (Chapman & Suryadarma, 2013). Lima tahun setelahnya, atau pada tahun 2018, Eza Elmira dan Daniel Suryadarma datang memberi satu konklusi baru: dengan menggunakan data pendapatan lulusan perguruan tinggi, mereka menemukan bahwa model pinjaman *Income-Contingent Loan* (ICL) dengan beban pembayaran yang rendah memiliki potensi untuk diterapkan di Indonesia dan bisa meningkatkan akses ke universitas (Elmira et al., 2018). Pada tahun yang sama, Arwildayanto, melalui tulisan berjudul *Formulasi Pembiayaan Pendidikan Tinggi Melalui Penyaluran Kredit Pendidikan Bagi Mahasiswa Indonesia*, juga menyerukan hal serupa: pinjaman mahasiswa sebaiknya diterapkan dengan bunga ringan dan dijalankan oleh institusi pemerintah bukan bank (lewat LPDP) (Arwildayanto, 2018). Akan tetapi, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya: alih-alih mengadopsi rekomendasi Eza Elmira dan Daniel Suryadarma untuk menerapkan ICL, pemerintah, melalui BTN dan BRI, justru menerapkan pinjaman berbasis tenor. Lebih lanjut, syarat kredit yang cukup berat dimanfaatkan oleh penyedia jasa pinjaman swasta untuk membuka bisnis finansial (Zaki et al., 2023). Sayangnya, penyedia pinjaman swasta ini tidak menggunakan model ICL yang ditawarkan oleh Elmira dan Suryadarma, tapi sistem TBRL.

Sementara itu, di Australia dan Malaysia, kebijakan kredit pendidikan menuai perdebatan sengit di antara akademisi, birokrat, mahasiswa/i, dan publik secara umum. Di Malaysia, diskusi soal *student loan* berkisar pada pembahasan soal kontribusi, tantangan, dan kritik penerapan kebijakan kredit pendidikan. Di satu sisi, penelitian yang dilakukan oleh Kenyathulla dan Zhang menemukan bahwa hadirnya *student loan* membantu meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi bagi keluarga berpenghasilan menengah ke bawah (Kenyathulla & Tengyue, 2016). Di sisi yang lain, kajian lain menunjukkan adanya berbagai masalah yang muncul dari penerapan kebijakan kredit pendidikan, mulai dari tingkat gagal bayar yang tinggi karena beban cicilan tidak sesuai dengan kemampuan finansial mahasiswa/I, lemahnya mekanisme pembayaran hutang, dan beban hidup yang diakibatkan oleh pinjaman pendidikan (Edward et al., 2015).

Di Australia, *student loan* merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mempertahankan akses pendidikan tinggi sekaligus menjaga keseimbangan kemampuan fiskal negara. Pendukung kredit pendidikan berpendapat bahwa kebijakan tersebut mampu meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi (Chapman & Ryan, 2005). Kajian lain mengungkapkan bahwa desain pinjaman ICL di Australia secara signifikan menurunkan risiko gagal bayar dan mengurangi tekanan finansial pada lulusan berpendapatan rendah (Barr, 2011; Martinenghi, 2021). Karena dinilai mampu melaksanakan kebijakan pinjaman mahasiswa dengan baik, Australia menjadi percontohan bagi negara lain yang ingin menerapkan *student loan*. Meskipun begitu, praktik *student loan* di Australia juga dikritik oleh akademisi karena memperbesar akumulasi hutang mahasiswa, normalisasi hutang sebagai bagian integral dari pengalaman pendidikan tinggi, dan memperburuk kondisi hidup mahasiswa/1 (Marginson, 2016).

Di satu sisi, kendati berhasil memberikan penjelasan detail mengenai kemungkinan dan proyeksi penerapan kebijakan kredit pendidikan di Indonesia, penelitian terdahulu yang bercorak ekonomi tidak membahas secara panjang lebar penerapan dan dampak implementasi *student loan* di negara lain. Padahal, uraian tersebut diperlukan sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan sebelum memutuskan untuk melaksanakan kebijakan kredit pendidikan di Indonesia. Artikel yang ditulis oleh Brue Chapman dan Daniel Suryadarma serta Eza Elmira dan Daniel Suryadarma, contohnya, hanya mengulas sekilas praktik kredit pendidikan di Australia; ulasan itu diposisikan sebagai latar belakang untuk mengantarkan pada pembahasan inti artikel yakni kemungkinan penerapan kredit pendidikan di Indonesia. Di tempat lain, karya Arwildayanto mengabaikan implementasi kebijakan *student loan* di negara lain karena memilih fokus pada solusi pembiayaan pendidikan tinggi lewat kredit. Di sisi lain, walaupun deretan kajian di Australia dan Malaysia telah menyingkap perdebatan dan kontroversi tentang pinjaman pendidikan, ragam penelitian tersebut belum menganalisis kebijakan *student loan* dari sudut pandang ekonomi-politik dan finansialisasi pendidikan tinggi.

Oleh karena itu, berbeda dari kajian terdahulu, tulisan ini ingin menyajikan analisis komparatif tentang kebijakan *student loan* di dua negara lain, yakni Australia dan Malaysia, dengan menggunakan paradigma ekonomi-politik finansialisasi. Costas Lapavitsas mendefinisikan finansialisasi sebagai proses meningkatnya independensi dan kekuatan finansial, keterlibatan langsung perusahaan non-finansial dan rumah tangga dalam pasar finansial, dan pengerukan keuntungan lewat jalur finansial daripada produksi (Lapavitsas, 2009; Lapavitsas & Powell, 2013; Lapavitsas, 2013; Lapavitsas, 2009). Menurut Lapavitsas, finansialisasi tidak terjadi begitu saja, tapi difasilitasi oleh pemerintah melalui serangkaian kebijakan yang memaksa warga negara berhimpitan dengan pinjaman. Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang memaksa warga negara adalah pengurangan subsidi pada area kehidupan yang mestinya menjadi hak milik publik seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks studi ekonomi-politik kebijakan, fenomena itu dinamakan sebagai “*the retreat of the state*”, pengurangan peran finansial pemerintah dalam sektor publik yang menyebabkan warga negara mesti mengambil kredit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kecenderungan tersebut menciptakan apa yang Lapavitsas sebut sebagai “*financial expropriation*” (penyedotan finansial), proses pengerukan keuntungan lewat bunga yang melekat pada hutang dan harus dibayar oleh peminjam (Lapavitsas, 2013).

Malaysia dipilih karena negara itu telah melaksanakan *student loan* sejak akhir tahun 1990-an; model TBRL yang digunakan di Malaysia memberikan pencerahan bagaimana implementasi dan efek dari pinjaman berbasis tenor. Sementara itu, Australia dipilih karena ia merupakan pelopor ICL di dunia. Tercatat, pemerintah Australia telah menerapkan ICL sejak tahun 1989. Implementasi program ICL yang sudah diterapkan selama lebih dari tiga dekade memberikan pemahaman mengenai pro dan kontra ICL. Sebagai pedoman pembahasan, kajian ini menyodorkan tiga pertanyaan penelitian: (a) apakah ada perbedaan antara model ICL dan TBRL? (b) Bagaimana dua rezim *student loan* itu dijalankan di Australia (ICL) dan Malaysia (TBRL) serta bagaimana dampaknya?

Secara umum, kajian ini mempunyai kontribusi praktis dan teoretis. Pada aspek praktis, penelitian ini menyajikan bukti konkret dari implementasi kebijakan kredit pendidikan ICL di Australia dan TBRL di Malaysia. Dari penjelasan mengenai deskripsi teknis, substantif, dan dampak dari penerapan kredit pendidikan tersebut, tulisan ini memberikan gambaran apa saja prasyarat yang harus dipenuhi apabila pemerintah Indonesia ingin melaksanakan *student loan*. Dari dimensi teoretis, riset ini mencoba memperkaya kajian kredit pendidikan di Indonesia dengan menghadirkan analisis kritis tentang kasus Australia dan Malaysia. Dengan menggunakan paradigma ekonomi-politik, kajian ini menengahkan argumen baru (novelty) yang belum dieksplorasi dalam penelitian terdahulu tentang kebijakan kredit pendidikan: munculnya kredit pendidikan merupakan bentuk finansialisasi pendidikan tinggi yang disebabkan oleh berkurangnya investasi publik negara pada sektor pendidikan (*the retreat of the state*).

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metodologi kualitatif untuk menganalisis kebijakan *student loan* di Australia dan Malaysia. Pendekatan kualitatif yang dipilih adalah komparasi kebijakan publik (*comparative public policy*). *Comparative public policy* (selanjutnya disebut CPA) dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian ini, yakni menyingkap perbedaan atau persamaan kebijakan kredit pendidikan di Australia dan Malaysia dan menguraikan pelajaran apa yang bisa didapat dari implementasi kebijakan itu.

Penelitian ini dilaksanakan di Indonesia selama satu tahun, dimulai pada November 2024 sampai Desember 2025. Fokus utama pembahasan kajian ini adalah analisis implementasi kebijakan *student loan* dan dampaknya di Australia dan Malaysia. Secara khusus, penelitian ini mencoba membandingkan penerapan dua sistem kebijakan *student loan* yang dijalankan di Australia dan Malaysia dengan *setting* ekonomi dan institusi yang berbeda. Dalam hal ini, analisis komparatif menyediakan perangkat bagi penulis untuk menemukan perbedaan konsep dan penerapan kebijakan kredit pendidikan antar dua negara tersebut dan persamaan dalam hal hasil kebijakan pinjaman mahasiswa. Fokus komparasi dalam kajian ini terletak pada substansi kebijakan di dua negara berbeda (*cross-national*), bukan pada proses (*cross-time*), perbandingan konsep atau teori, atau perbandingan antar sektor (*cross-sectoral*) (Fischer et al., 2007; Gupta, 2012). Dimensi substansi kebijakan yang dimaksud adalah *repayment burden*, *duration of loan*, *interest rates*, *method of collection*, *earning threshold*; dimensi-dimensi itu merupakan bagian penting dari kebijakan kredit pendidikan (Barr et al., 2017).

Kajian ini menggunakan data sekunder sepenuhnya. Jenis data sekunder yang digunakan bervariasi, mulai dari artikel, buku, jurnal, hingga tulisan di media massa. Dokumen yang dianalisis dalam riset ini berjumlah 34 buah, dengan rincian empat buku, 24 artikel jurnal, dua laporan riset lembaga independen, empat berita. Berbagai dokumen tersebut dipublikasikan dalam rentang periode 2009 – 2024. Ragam data sekunder itu dipilih berdasarkan tiga kriteria: akses, relevansi ilmiah, dan relevansi substansi. Berdasarkan kriteria tadi, penulis menggunakan literatur yang ditulis oleh Bruce Chapman untuk menganalisis kebijakan ICL di Australia karena dominannya peran Chapman dalam proses perumusan kredit pendidikan di Australia dan penyebarluasan kebijakan ICL di seluruh dunia. Sementara itu, untuk menganalisis kebijakan *student loan* di Malaysia penulis mengandalkan analisis yang ditulis oleh Wan Saiful Wan Jan dan juga artikel, jurnal, dan tulisan di media massa. Selain dua penulis tersebut, peneliti juga mendayagunakan ragam data sekunder yang relevan untuk menjelaskan implementasi dan dampak kebijakan kredit pendidikan di Australia dan Malaysia.

Kajian ini menggunakan teknik analisis tematik. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya adalah pembacaan teks, koding, kategorisasi, tematisasi, dan penulisan dan analisis narasi komparatif kebijakan. Pertama-tama, penulis melakukan pencarian pemilihan dokumen yang relevan melalui Google Scholar dengan kata kunci "*student loan*", "*Income-Contingent Loan*", "*Time-Based Repayment Loan*". Setelah itu, penulis mulai membaca berbagai manuskrip yang telah diseleksi berdasarkan kriteria akses, relevansi ilmiah, dan relevansi substansi. Pada tahap koding data, penulis melakukan identifikasi tema sentral yang muncul dalam wacana dan praktik penerapan kredit pendidikan di Australia dan Malaysia dari dokumen. Setelah itu, peneliti melangsungkan kategorisasi data, dengan cara mengumpulkan tema-tema sentral yang telah teridentifikasi tadi menjadi kelompok tertentu. Pada langkah tematisasi, tema sentral yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu dibandingkan untuk menemukan persamaan atau perbedaan wacana atau praktik penerapan *student loan* di Australia dan Malaysia. Tema sentral yang sudah ditematisasi kemudian dinarasikan di dalam pembahasan

Hasil dan Pembahasan

Membangun Tipe-Ideal Model Pinjaman Mahasiswa: *Time-Based Repayment Loan* dan *Income-Contingent Loan*

Salah satu karakteristik utama *student loan* di Amerika Serikat adalah fokusnya pada durasi waktu yang ketat. Sama seperti pinjaman rumah, mahasiswa/I di Amerika Serikat diwajibkan membayar hutangnya dalam jangka waktu yang telah disetujui di awal, misalnya selama sepuluh tahun. Bedanya, apabila pinjaman rumah atau kendaraan biasanya menggunakan agunan, *student loan* di Amerika Serikat tidak menyertakan jaminan. Pemerintah federal berperan sebagai penjamin mahasiswa/I yang meminjam sejumlah uang ke bank. Apabila dalam waktu sepuluh tahun mahasiswa/I yang sudah lulus tidak bisa membayar hutang bersama bunganya (biasa dikenal dengan istilah *default*), pemerintah federal akan menanggung beban tersebut. Sistem ini dikenal dengan model *time-based repayment loan* (TBRL) atau *mortgage-based*. Satu ciri khas kebijakan *student loan* di Amerika Serikat lainnya adalah kompleksitas pasar kredit pendidikan. Di Amerika Serikat terdapat berbagai jenis *student loan*, diantaranya adalah Stafford, Perkins,

Grad PLUS, Parent PLUS, dan kredit pendidikan dari sektor finansial swasta (Edmiston et al., 2013). Banyaknya pilihan tersebut menyebabkan aktor yang terlibat dalam sistem pinjaman pendidikan di Amerika Serikat sangat banyak: penyedia kredit terdiri dari pemerintah federal, universitas, sektor finansial (kreditur swasta dan pasar modal) dan penerima hutang terdiri dari mahasiswa/I dan orang tua (Edmiston et al., 2013). Sementara itu, pada tahap penarikan pinjaman, Departemen Pendidikan Amerika Serikat melibatkan jasa pihak swasta untuk menagih hutang mahasiswa/I atau orang tua (Best & Best, 2014).

Berbeda dengan Amerika Serikat, Australia menerapkan *Income-Contingent Loan* (ICL). Perbedaan utama antara TBRL dan ICL adalah soal durasi waktu pembayaran. ICL tidak memiliki tenor pembayaran tetap seperti TBRL. Artinya, salah satu karakteristik ICL adalah pemberi pinjaman (dalam hal ini pemerintah) tidak mematok waktu, misalnya dalam kurun waktu sepuluh atau lima belas tahun hutang harus lunas (Chapman & Dearden, 2017). Mahasiswa/I diwajibkan membayar hutang saat dia sudah mendapat pekerjaan dan gajinya sudah melewati ketentuan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Aspek gaji menjadi dimensi penting di sini: di Australia, meskipun mahasiswa/I sudah bekerja, selama dia belum mencapai standar gaji tertentu, dia tidak diwajibkan membayar pinjaman (Chapman, 1997; Chapman & Dearden, 2017). Konsekuensinya, durasi pengembalian *student loan* di Australia lebih panjang daripada di Amerika Serikat. Rata-rata tingkat waktu pengembalian itu bisa mencapai dua puluh sampai tiga puluh tahun, bergantung tentunya dengan kondisi ekonomi nasional dan global. Kendati begitu, lamanya durasi waktu pengembalian itu bukan menjadi masalah bagi pemerintah Australia sebab ICL memang didesain sebagai mekanisme hutang yang peka terhadap kondisi ekonomi peminjam. Jadi, berbeda dari TBRL, ICL lebih bersahabat dengan kelompok miskin dan marjinal lainnya, karena dengan fleksibilitas itu mereka lebih terlindungi, utamanya pada saat masa-masa genting seperti krisis ekonomi atau masalah finansial lainnya.

Uraian di atas memberi pemahaman bahwa di dunia terdapat dua model pinjaman mahasiswa, TBRL dan ICL. Untuk memperjelas perbedaan antara keduanya, kita mesti membentuk tipe ideal agar bisa memahami model pinjaman yang diterapkan di dua negara tersebut. Mengikuti pemahaman tipe-ideal dari Max Weber, tulisan ini membagi kebijakan *student loan* menjadi dua tipe ideal: *time-based repayment loan* dan *income-contingent loan*. Sebagai sebuah tipe-ideal, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Sesuai dengan fitur-fitur yang ada dalam pembahasan mengenai wacana dan praktik kebijakan kredit pendidikan, perbedaan itu dapat dicermati dengan beberapa konsep kunci seperti *repayment burden*, *duration of loan*, *interest rates*, *method of collection*, *earning threshold*. Untuk memudahkan penjelasan, tabel di bawah ini menyajikan tipologi perbedaan antara dua rezim kebijakan *student loan* itu.

Tabel 1. Perbedaan Antara *Time-Based Repayment Loan* dan *Income-Contingent Loan*

	<i>Time-Based Repayment Loan</i>	<i>Income-Contingent Loan</i>
Durasi Peminjaman	Waktu tetap, ditentukan berdasarkan kesepakatan, biasanya 10 tahun.	Waktu tidak tetap, lebih fleksibel.
Bunga	Bunga ditetapkan oleh bank dan pemerintah federal setelah melihat dokumen-dokumen yang menyatakan tingkat ekonomi keluarga calon penerima <i>student loan</i> .	Bunga ditetapkan oleh peraturan pemerintah dan sebisa mungkin rendah.
Batas Gaji	Tidak ada batas gaji	Terdapat batas gaji
Beban Pembiayaan	Persentase beban pembiayaan sangat besar akibat durasi peminjaman tetap dan bunga yang mengikuti evaluasi ekonomi keluarga.	Beban pembiayaan terhitung kecil karena pemerintah telah menetapkan batas minimal gaji sebelum mahasiswa/I bisa membayar pinjaman.
Cara Penarikan Hutang	Melalui badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah atau jasa penarikan hutang swasta yang dikontrak oleh Kementerian Pendidikan	Melalui kantor pajak

Sumber: Analisis Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel di atas, kita dapat mulai memahami perbedaan antara model TBRL dan ICL. Dari segi durasi peminjaman, sistem TBRL menerapkan jangka waktu yang lebih ketat daripada ICL. Selanjutnya, dari aspek bunga pinjaman, ICL mengatur secara legal berapa persen bunga yang harus

dibayarkan mahasiswa/I dan seberapa banyak pemerintah akan mensubsidi persentase bunga tersebut. Sementara itu, dalam sistem TBRL, bunga ditetapkan oleh bank dan pemerintah federal. Pada dimensi batas gaji, ICL menetapkan *salary cap* atau batasan minimal pendapatan yang menjadi dasar penarikan pinjaman mahasiswa. Artinya, ketika gaji yang didapat oleh mahasiswa/I sudah memenuhi standar minimal, dia wajib membayar hutangnya, apabila belum melewati dia belum memiliki keharusan membayar *student loan*. Pada TBRL, fitur batas gaji ini relatif absen karena basis penarikan hutang pada sistem TBRL memakai jangka waktu. Tidak adanya batas minimal gaji ini membuat model TBRL biasanya mempunyai beban pembiayaan yang sangat besar karena memang tidak fleksibel. Sederhananya, karena TBRL tidak mengakomodasi batas minimal pendapatan, *payroll* pembayaran hutang terus berjalan, terlepas dari bekerja atau tidaknya mahasiswa/i atau berapapun pendapatan yang diterima oleh mahasiswa/i.

Sebagai contoh, jika seorang lulusan bekerja namun gajinya hanya mentok di standar UMR, sebagian besar pendapatan itu akan langsung terserap untuk membayar hutang. Terakhir, pada aspek penarikan, pemerintah yang menggunakan ICL akan memberdayakan kantor pajak untuk menarik dana dari mahasiswa/I melalui sistem penarikan dana iuran sosial. Dalam hal ini, penyelenggara model ICL akan bekerja sama dengan perusahaan yang menerima lulusan sebagai pekerja. Penjelasan tersebut merupakan tipe ideal, sebuah kerangka konseptual yang disadur dari berbagai literatur relevan tentang TBRL dan ICL. Guna memperdalam pengetahuan mengenai implementasi kebijakan pinjaman mahasiswa, kita mesti melihat secara langsung bagaimana pemerintah terkait menerapkan dua model tersebut. Oleh karena itu, kita harus bergerak ke bagian selanjutnya.

Kebijakan *Mortgage-Based Loan* dan *Income-Contingent Loan* di Australia dan Malaysia

Australia

Pemerintah Australia memiliki program *student loan* bernama Higher Education Loan Program (HELP) dan VET Student Loans (VSL). Menurut kanal resmi pemerintah Australia, HELP merupakan pinjaman yang diberikan kepada calon mahasiswa/I atau mahasiswa/I di tingkat universitas; di sisi lain, VSL adalah varian pinjaman yang dialokasikan untuk subjek didik di level sekolah vokasi. Karena fokus studi ini ada di level perguruan tinggi, maka pinjaman yang dibahas di sini terbatas pada HELP. HELP dapat dibagi menjadi dua: HECS-HELP dan FEE-HELP. HECS-HELP merupakan pinjaman bagi mahasiswa yang mendaftar dan mendapat tempat di *commonwealth supported place* (CSP); ringkasnya, CSP adalah sebuah universitas yang didukung dengan subsidi pemerintah Australia (di Indonesia, CSP hampir sama dengan definisi PTN). Subsidi dari pemerintah membuat biaya kuliah di universitas tersebut berkurang, menyisakan beberapa ongkos yang harus ditanggung oleh mahasiswa/i. Sisa biaya dari subsidi tersebut dinamakan sebagai *student contribution*. Dalam skema tersebut, HECS-HELP dapat digunakan untuk membayar *student contribution*. Di sisi yang lain, FEE-HELP diberikan kepada mahasiswa yang memilih berkuliah di universitas yang tidak masuk ke dalam skema subsidi pemerintah. Pada konteks ini, perguruan tinggi mengatur sendiri biaya yang harus dibayarkan mahasiswa. Karena tidak ada dukungan uang dari pemerintah Australia, mahasiswa/I yang menuntut ilmu di universitas ini mesti membayar semua uang kuliah. Bagi mereka yang mendaftar di FEE-HELP, pemerintah Australia mewajibkan mahasiswa/I membayar biaya layanan pinjaman sebesar 20 persen dari total pinjaman. Misalkan, seorang mahasiswa/I berkuliah di jurusan yang mematok harga \$3,000, maka biaya jasa layanan pinjamannya adalah \$600. Jika ditotal, maka jumlah seluruh pinjamannya adalah \$3,600. Syarat mendaftar pinjaman FEE-HELP sama dengan HECS-HELP.

HELP, baik itu HECS-HELP dan FEE-HELP, bisa digunakan untuk keperluan membayar kontribusi mahasiswa (HECS-HELP), uang kuliah, kebutuhan belajar di luar negeri, dan biaya layanan mahasiswa. Per 2024, batas pinjaman HELP adalah \$121,844 untuk semua jurusan, pengecualian ada pada beberapa program studi: limit pinjaman prodi medis, kedokteran gigi, dan kedokteran hewan adalah \$174,998 sedangkan untuk aviasi batas pinjamannya adalah \$152,700. Khusus pembayaran kontribusi siswa dan uang kuliah, pemerintah Australia membayarkan uang tersebut kepada universitas terkait secara langsung. Di Australia, ongkos kontribusi siswa dan uang kuliah diserahkan pada awal masa studi. Sejumlah uang itu yang nanti harus dibayar oleh mahasiswa setelah lulus.

Pemerintah Australia menetapkan aturan mengenai beban pengembalian, batas gaji minimal untuk membayar hutang, tingkat bunga, dan metode pengumpulan pembayaran hutang. Di Australia, batas minimal pendapatan seorang lulusan adalah \$54,435 per tahun (setelah hitung-hitungan *tax return*). Dengan pendapatan sebesar itu, seorang memiliki beban pengembalian sebesar 1 persen dari seluruh gajinya selama setahun. Semakin tinggi gaji yang didapat, semakin tinggi pula beban pengembalian itu. Namun, apabila seseorang belum mencapai batas \$54,435, dia belum punya kewajiban membayar hutang pinjaman mahasiswa. Secara teknis, pinjaman mahasiswa di Australia tidak berbunga (*interest free*). Namun, nilai pengembalian itu tidak stabil, tapi mengikuti perkembangan inflasi, pemerintah Australia menamai hal ini sebagai "*indexation*". Perhitungan *indexation* sangat fleksibel, besar tingkat bunga tahun 2024 belum tentu sama di tahun 2025. Setiap tahun, pemerintah Australia akan mengumumkan *indexation* pada tanggal 1 Juni.

Untuk menarik pinjaman dari mahasiswa, pemerintah Australia memberi tugas kepada Kantor Pajak Australia. Kantor Pajak Australia menggunakan sistem pajak penghasilan untuk mengumpulkan pembayaran hutang dari mahasiswa yang sudah bekerja dan melampaui batas minimal gaji. Guna memuluskan langkah ini, Kantor Pajak Australia aktif berkolaborasi dengan perusahaan atau pemberi kerja mengenai informasi pekerja yang pernah berkuliah menggunakan *student loan*. Di sisi yang lain, Kantor Pajak juga mewajibkan lulusan memberi tahu perusahaan tempat kerjanya bahwa dia punya tanggungan hutang pendidikan. Perusahaan yang mendapat informasi itu akan langsung memotong gaji karyawannya, setelah itu baru mengirimkan ke Kantor Pajak Australia. Proses ini hampir sama dengan penarikan pajak atau iuran sosial yang sudah dijalankan oleh banyak negara.

Dalam kondisi tertentu, seorang lulusan bisa menunda pembayaran jika dia mengalami berbagai kejadian yang di luar kendalinya. Tiga diantaranya adalah bencana alam, sakit parah yang menyebabkan tidak bisa bekerja, serta situasi sulit lainnya. Sebagai bagian dari transparansi, Kantor Pajak Australia akan meminta data tentang pendapatan dan pengeluaran rumah tangga sebagai bahan justifikasi. Selain itu, kantor pajak juga akan meminta informasi tambahan seperti slip gaji terakhir. Ketika mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan meninggal, hutangnya langsung diampuni. Dalam hal ini, pemerintah akan merelakan sejumlah uang yang pernah digunakan mahasiswa tersebut untuk menuntut ilmu.

Malaysia

Malaysia mulai menerapkan *student loan* pada tahun 1997. Pada tahun 1996, melalui *the Private Higher Educational Institutions Act 1996*, pemerintah memberikan izin pada sektor swasta untuk terlibat dalam pengembangan pendidikan tinggi di Malaysia (Wan, 2020). Kebijakan ini melahirkan banyak penyedia jasa pendidikan tinggi di Malaysia, baik dalam bentuk swasta secara penuh dan universitas swasta yang didukung oleh perusahaan pemerintah. Satu tahun setelahnya, pemerintah Malaysia memperkenalkan Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 yang menjustifikasi pendirian Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) (Haneza, 2021; Wan, 2020). Sejak tanggal 1 November 1997, PTPTN mulai beroperasi. PTPTN adalah agensi atau badan mandiri yang khusus didirikan untuk mengelola *student loan* di Malaysia. Cara kerja PTPTN sangat sederhana. Pertama, pemerintah Malaysia mengalokasikan sejumlah dana ke PTPTN sebagai modal awal. Setelah itu, PTPTN akan mendistribusikan pinjaman ke mahasiswa/i. Kemudian, PTPTN harus menarik dana pinjaman dari mahasiswa/I enam bulan setelah mereka lulus. Uang yang dikembalikan oleh lulusan tersebut lalu digunakan kembali oleh PTPTN untuk mendanai calon mahasiswa/I lain.

Di Malaysia, berbeda dari Australia, *student loan* dikelola oleh badan independen. Dari penjelasan proses bisnis tersebut, PTPTN bisa didefinisikan sebagai lembaga publik *quasi-market*. Sebagai lembaga publik, PTPTN harus memastikan bahwa setiap tahun terdapat dana yang cukup untuk dipinjamkan ke calon mahasiswa/i. Dari tahun 1997 sampai 2002, performa PTPN relatif masih aman karena masih bergantung pada suntikan dana pemerintah Malaysia; pada kurun waktu lima tahun itu pemerintah menggelontorkan dana sebanyak RM5 juta kepada PTPTN (Wan, 2020). Namun, setelah tahun 2003, pemerintah menghentikan pemberian dana itu. Konsekuensinya, PTPTN mesti mencari sumber pendanaan lain selain dari subsidi pemerintah.

Model *student loan* yang diterapkan di Malaysia adalah TBRL atau *mortgage-based*. Sedari awal, PTPTN menentukan jumlah pinjaman yang bisa diambil dan berapa lama waktu pengembalian pinjaman tersebut. Di kanal resmi PTPTN, disebutkan bahwa jumlah pinjaman didasarkan pada pemeringkatan atau kategorisasi. PTPTN membuat tiga pemeringkatan, yakni maksimum, 75% dari pinjaman maksimum, dan 50% dari pinjaman maksimum. Pinjaman maksimum ditujukan untuk mahasiswa/I yang terdaftar sebagai penerima Sumbangan Tunai Rahmah (STR), semacam bantuan sosial di Malaysia. Yang masuk dalam kategori ini adalah keluarga tidak mampu. Selanjutnya, 75% dari pinjaman maksimum dapat diambil oleh mahasiswa/I yang tidak masuk ke dalam daftar STR, namun pendapatan keluarganya tidak melebihi RM8,000. Terakhir, 50% dari pinjaman maksimum diberikan kepada mahasiswa/I yang tidak masuk ke dalam daftar STR namun pendapatan keluarganya lebih dari RM8,000. Pemeringkatan pinjaman itu kemudian diaplikasikan ke dalam skenario pinjaman berdasarkan jenjang pendidikan yang diambil dan pemeringkatan pinjaman. Lebih detailnya lihat tabel di bawah ini:

Tabel 2. Skenario Pinjaman Menurut Pemeringkatan

Jenis Institusi	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pinjaman Mengikuti Pemeringkatan		
		Maksimum (RM)	75% (RM)	50%(RM)
Universitas Umum,	Diploma	4,750	3,560	2,380
	Sarjana (Sains)	6,650	4,990	3,330
Politeknik, Akademi	Sarjana (Sastra)	6,180	4,630	3,090
	Master	9,500	7,130	4,750

	Doktor	24,700	18,530	12,350
	Kursus Profesional	5,700	4,280	2,850
Perguruan Tinggi Swasta	Foundation	6,800	5,100	3,400
	Diploma	6,800	5,100	3,400
	Diploma (Farmasi, Gigi, dan Ilmu Kesehatan)	12,750	9,560	6,380
	Sarjana (Sains)	14,030	10,520	7,010
	Sarjana (Sastra)	13,600	10,200	6,800
	Sarjana (Farmasi, Gigi, dan Ilmu Kesehatan)	17,000	12,750	8,500
	Sarjana Muda Perubatan	50,000	37,500	30,000

Sumber: Wan, 2020

Berdasarkan pilihan-pilihan itu, mahasiswa/I dibebaskan untuk memilih opsi terbaiknya. Setelah itu, PTPTN akan menentukan jumlah pembayaran hutang dan periode pengembalian berdasarkan jumlah pinjaman yang diambil oleh mahasiswa/i. Peminjam, dalam hal ini mahasiswa/I, diberikan waktu selama dua belas bulan sebelum mulai melakukan pembayaran. Periode satu tahun itu merupakan keringanan yang diberikan oleh pemerintah Malaysia dengan harapan lulusan bisa mendapatkan pekerjaan. Sesudah satu tahun masa tunggu selesai, mahasiswa/I yang meminjam dari PTPTN diwajibkan membayar hutang tanpa melihat apakah lulusan sudah bekerja atau belum dan apakah pendapatan dari pekerjaannya cukup untuk bertahan hidup apabila menanggung beban *student loan*. Di kanal resminya, PTPTN tidak menyertakan periode pengembalian secara detail. Pada menu “pengembalian”, PTPTN hanya menyebutkan bahwa periode pengembalian akan ditentukan berdasarkan jumlah uang yang dipinjam mahasiswa. Namun, menurut artikel panjang yang ditulis Wan Saiful Wan Jan, terdapat empat skenario jumlah pinjaman dan waktu pengembalian.

Tabel 3. Skenario Waktu Pengembalian Pinjaman Mahasiswa

Jumlah Pinjaman (dalam Ringgit Malaysia)	Perode Pengembalian (dalam bulan)	Jumlah Pengembalian (dalam Ringgit Malaysia)
Di bawah 10,000	60	Sampai 175
10,000 – 22,000	120	92-202
22,000 – 50,000	180	141-320
Lebih dari 50,000	240	Lebih dari 250

Sumber: Wan Jan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, kita bisa memperkirakan dengan jumlah pinjaman sekian, seorang mahasiswa harus mengangsur berapa lama dan berapa besaran angsurannya setiap bulan. Unikinya, dan ini yang membedakan kebijakan *student loan* di Malaysia dan Australia, mahasiswa/I bisa lepas dari tanggungan hutang apabila dia mampu lulus dengan status Pujian Pertama pada level sarjana. Selain itu, sebagai tanggapan atas masalah pengembalian, pemerintah Malaysia telah memasukkan opsi angsuran yang lebih fleksibel. PTPTN menamai programnya dengan “Penjadwalan dan Penstrukturan Pinjaman”. Melalui skema ini, waktu pinjaman bisa diperpanjang hingga usia 60 tahun dengan beban pembayaran sebesar 5-8% per bulan dari seluruh pendapatan kasar.

Ekonomi-Politik Kredit Pendidikan: Akses, Komodifikasi, dan Finansialisasi

Kebijakan *student loan* di Australia dan Malaysia berpangkal pada dua sumber masalah: perubahan demografi dan keterbatasan finansial karena adanya politik anggaran. Dengan bertambahnya lulusan SMA dan SMK, permintaan terhadap perguruan tinggi juga ikut naik. Kenaikan permintaan ini disebabkan oleh meningkatnya aspirasi penduduk, naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat, keinginan untuk mempertahankan kelas ekonomi serta sosial, dan perubahan kebutuhan industri dan kondisi pasar tenaga kerja yang menghendaki calon pegawai mesti memiliki minimal gelar sarjana. Berbagai faktor tersebut kemudian menciptakan sebuah fenomena yang disebut Randal Collins sebagai “masyarakat kredensial” (*credential society*). Dalam pengertian ini, penduduk, dalam hal ini masyarakat di Australia dan Malaysia, memutuskan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi tidak hanya demi mendapatkan

keterampilan dan meningkatkan produktivitas, tapi juga agar tetap kompetitif (Collins, 2019). Pada konteks ini, ijazah yang didapat dari perguruan tinggi berfungsi sebagai mekanisme pembatasan (*gatekeeping mechanism* atau *social closure*) karena di dalam rezim industri pemberi kerja mengharuskan calon tenaga kerja memiliki kualifikasi tertentu, salah satunya adalah kredensial pendidikan. Mekanisme pembatasan itu kemudian melanggengkan sistem stratifikasi sosial yang memperparah kesenjangan ekonomi, orang kaya akan mendapat pekerjaan mapan karena mampu berkuliah di perguruan tinggi favorit sedangkan orang miskin tidak akan beranjak dari posisi mereka karena akses pendidikan tinggi tidak bisa dijangkau dengan mudah.

Pemerintah Australia dan Malaysia pada dasarnya ingin menghindari adanya kesenjangan ekstrem akibat stratifikasi tersebut dengan cara memperluas akses pendidikan tinggi. Sayangnya, niat baik itu tidak diimbangi dengan investasi publik di bidang pendidikan. Seperti yang telah kita lihat pada bagian sebelumnya, dalam gerak yang sering disebut sebagai komodifikasi layanan publik, pemerintah Australia dan Malaysia mencoba menerapkan rancangan kebijakan sebagai berikut: mengurangi bantuan finansial pada sektor pendidikan tinggi, kemudian memindahkan beban finansial kepada mahasiswa/I dengan skema pembiayaan *burden-sharing*, dan lalu mengenalkan kredit pendidikan sebagai alternatif pembiayaan layanan pendidikan tinggi. Rangkaian kebijakan tersebut dilandasi oleh dua alasan utama: *Private Return on Investment* (PROI) pendidikan tinggi dan politik partisan. Argumen PROI menilai bahwa pendidikan tinggi memberi pengembalian keuntungan dalam bentuk individu ketimbang pengembalian dalam bentuk kolektif sehingga tidak etis apabila pembiayaannya harus menggunakan uang publik. Sementara itu, rasionalisasi politik partisan berkisar pada kenyataan bahwa kebijakan sosial sangat berkaitan dengan sistem politik demokrasi (Busemeyer et al., 2013). Pemimpin yang ingin terpilih kembali dalam pemilihan umum mesti mendukung program populis seperti kebijakan kesehatan, ketenagakerjaan, dan pensiun agar mendapat dukungan kuat konstituen (Busemeyer, 2009; Garritzmann, 2016). Dalam konteks kebijakan populis itu, pendidikan tinggi kerap diabaikan karena dianggap tidak sesuai dengan agenda pemimpin politik, partai politik, dan konstituen pendukungnya.

Pengurangan bantuan finansial pada sektor pendidikan tinggi dan skema *burden-sharing* menciptakan komodifikasi. Layanan pendidikan tinggi yang tadinya gratis, tiba-tiba menjadi barang dagang yang dipatok tarif tetap. Lambat laun, karena semakin menyusutnya suntikan dana publik, perguruan tinggi harus terus menaikkan biaya layanan yang membuat pendidikan tinggi menjadi semakin mahal. Kenaikan ongkos pendidikan tinggi karena dua kebijakan tersebut mengancam akses bagi kelas menengah ke bawah. Sebagai respon atas masalah itu, pemerintah Australia dan Malaysia akhirnya memperkenalkan kebijakan kredit pendidikan. Pertanyaan kritisnya adalah: mengapa pemerintah Australia dan Malaysia memilih kebijakan *student loan* dan bukan alternatif yang lain seperti menambah dana institusi kepada lembaga penyelenggara pendidikan tinggi atau memberikan subsidi kepada mahasiswa secara langsung? Secara umum, pemerintah Australia dan Malaysia memilih *student loan* sebagai solusi atas masalah akses karena memperbesar dana publik ke sektor pendidikan tinggi kurang etis sebab yang menerima *return on investment* adalah individu, bukan masyarakat secara umum (PROI); selain itu, kredit pendidikan merupakan cara paling cepat bagi pemimpin politik untuk menyelesaikan masalah tanpa harus mengurangi porsi kebijakan sosial yang lebih populis seperti subsidi energi, kesehatan, dan pensiunan. Implementasi kredit pendidikan sebagai solusi dilatarbelakangi oleh argumen PROI dan politik partisan yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

Kemunculan kredit pendidikan di Australia dan Malaysia menandakan adanya finansialisasi pendidikan tinggi. Dalam konteks *student loan*, finansialisasi merujuk pada intensifikasi solusi dan peran sistem serta mekanisme finansial pada bidang pendidikan, sektor yang sebelumnya tidak terjamah oleh institusi finansial. Setelah kebijakan kredit pendidikan dilaksanakan, mahasiswa/I di Australia dan Malaysia terlibat aktif dalam sistem finansial yang menjerat mereka; setiap warga Australia dan Malaysia yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke level perguruan tinggi harus berkubang dalam sistem finansial yang menuntut mereka berkenalan dengan mekanisme finansial. Pada taraf selanjutnya, karena terpaksa mengikuti skema yang dirancang oleh pembuat kebijakan, mahasiswa/I menjalankan perannya sebagai aktor di dalam sistem finansial: mereka meminjam sejumlah uang dari pemerintah atau lembaga *quasi-market*, menjalani pendidikan dengan bayang-bayang hutang dan bunganya, bekerja sambil melunasi hutang yang telah mereka gunakan beserta bunganya. Peran baru sebagai kreditur itu menyeret mereka berurusan dengan institusi finansial seperti PTPTN dan Kantor Pajak Pemerintah Australia yang sebetulnya tidak memiliki kaitan langsung dengan proses pendidikan; kaitan itu hanya ada karena finansialisasi pendidikan tinggi yang melanda Australia dan Malaysia memaksa mahasiswa/I tunduk pada sistem yang dibuat oleh institusi finansial tersebut.

Partisipasi aktif anak muda dalam sistem finansial membentuk subjek baru. Subjek baru itu adalah “*The Indebted Subject*”, seseorang yang perilaku, sikap, dan relasi sosialnya terbentuk karena praktik hutang (Lazzarato et al., 2012). Pada konteks ini, hutang menjadi instrumen kebijakan yang sangat mempengaruhi bagaimana warga negara bertindak. Dalam kasus *student loan*, hal ini termanifestasikan dalam berbagai

keputusan finansial masa depan yang dibuat oleh mahasiswa/I di Australia. Survei yang dilakukan oleh Future Investment Group kepada lebih dari 1.000 responden menemukan bahwa *student loan* menjadi beban finansial. Sekitar 61% responden yang rentang usianya 22-29 menyelesaikan kuliah dengan rata-rata hutang mulai dari \$20,000 - \$50,000 (Investment, 2023). Beban pinjaman mahasiswa itu juga ikut mempengaruhi keputusan finansial lainnya, seperti pembelian rumah (59% responden), mobil (49%), dan memulai bisnis (33%) (Investment, 2023). Dilihat dari aspek gender, dampak *student loan* itu sangat buruk terhadap perempuan sebab situasi pasar tenaga kerja terkadang mendiskriminasi mereka. Belum lagi jika mereka memutuskan berkeluarga dan mempunyai anak. Temuan tersebut menjadi contoh nyata bahwa *student loan* sangat mempengaruhi tindakan, perilaku, dan keputusan anak muda. Karena bayang-bayang hutang dan bunga yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu, anak muda di Australia menjadi manusia yang lebih memilih menghindari risiko (*risk-averse subject*) karena takut dengan konsekuensi di masa depan: mereka memilih menunda membeli rumah, mobil, memulai bisnis, menikah, dan memiliki keturunan.

Sesuai dengan diagnosis Lapavitsas, finansialisasi pendidikan tinggi di Australia dan Malaysia justru didorong oleh pemerintah yang seharusnya melindungi hak-hak dasar warga negara dalam bidang pendidikan. Di Australia dan Malaysia, kebijakan *student loan* bertautan dengan keterbatasan anggaran yang disebabkan oleh politik pengendalian anggaran atau disiplin fiskal dan perubahan demografis didorong oleh bertambahnya penduduk dan meningkatnya lulusan sekolah menengah atas serta aspirasi tinggi lulusan itu untuk berkuliah. Dengan semakin meningkatnya lulusan SMA yang ingin mengakses perguruan tinggi, solusi pemerintah pusat sangat jelas: memperluas kursi bagi calon-calon mahasiswa/I baru ini. Pertanyaan kuncinya, siapa yang akan membayar itu, apakah pemerintah dengan menggunakan pajak dari warga negara atau pengguna layanan? Pada saat itu, jawabannya mengarah pada opsi yang kedua, yakni pengguna layanan; Alasannya ada dua: (a) pemerintah tidak punya cukup anggaran untuk membiayai semua mahasiswa di universitas publik, (b) pembiayaan dengan pajak ke bidang yang aksesnya dinikmati oleh kelas menengah ke atas bersifat regresif daripada progresif (Barr et al., 2017; Chapman, 1997, 2013; Chapman & Dearden, 2017; Chapman & Hicks, 2018). Keputusan itu kemudian melahirkan kebijakan *burden-sharing* yang membuat mahasiswa/I harus membayar lebih untuk mengakses pendidikan tinggi. Akibatnya, uang per semester yang mesti dibayar oleh mahasiswa/I meningkat tajam. Hal ini mengancam akses pendidikan yang sebelumnya dapat dinikmati dengan mudah oleh warga negara. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Australia dan Malaysia kemudian menerapkan kebijakan kredit pendidikan agar akses pendidikan tinggi bisa dijangkau oleh warga negara, tanpa harus mengurangi porsi anggaran untuk sektor lainnya. Australia menjadi negara pertama yang menerapkan kebijakan *student loan* secara meluas pada tahun 1989, sedangkan Malaysia menyusul pada tahun 1997.

Setelah diterapkan, kebijakan kredit pendidikan di Australia dan Malaysia memberikan berbagai dampak. Di Australia, penyedotan finansial tidak terjadi secara masif karena pemerintah berperan sebagai perantara dan penjamin pinjaman dengan bunga yang relatif ringan. Meskipun begitu, penyedotan finansial tetap terjadi, utamanya dalam bentuk pengambilalihan gaji mahasiswa/I untuk membayar hutang yang mereka ambil pada masa kuliah. Dalam beberapa laporannya mengenai kebijakan *student loan* di Australia, ABC News mendokumentasikan bagaimana pinjaman pendidikan yang diiringi dengan implementasi *indexation* berdampak buruk pada kondisi penghidupan mahasiswa/i (Apap et al., 2023; Hegarty, 2023; Maguire, 2023). Tingkat inflasi yang tidak diimbangi oleh kenaikan gaji (meski produktivitas terus naik) membuat daya beli lulusan mahasiswa/I berkurang. Kenaikan harga yang disebabkan inflasi membuat mahasiswa/I harus berhadapan dengan kondisi ekonomi yang sangat buruk. Mereka harus membayar kredit pendidikan walau pendapatan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan akomodasi dan makan sehari-hari. Akibatnya, mahasiswa/I banyak yang tidak mampu menggapai aspirasi masa depannya karena uangnya sudah habis untuk membayar cicilan dan akomodasi dasar. Bahkan, ada mahasiswa/I yang harus bergantung dengan *food banks*, atau bahkan rela tidak makan, hanya untuk bertahan hidup (O'Flaherty & Hamilton-Smith, 2023).

Sementara itu, model TBRL yang dijalankan oleh pemerintah Malaysia menghasilkan serangkaian masalah akut. Dari segi finansial, proses bisnis yang dijalankan oleh PTPTN gagal membuatnya menjadi lembaga penyedia pinjaman berkelanjutan. Sejak tahun 2003, pemerintah Malaysia menghentikan suntikan dana kepada PTPTN. Sejak saat itu, PTPTN mesti meminjam dari bank komersial dan pasar modal untuk memenuhi kebutuhan layanan pinjamannya. Mereka terpaksa melakukan itu karena permintaan pinjaman dari penduduk semakin tahun semakin besar. Dengan besarnya permintaan itu, PTPTN harus mencari sumber pendanaan lain. Sayangnya, pinjaman dari bank komersial dan pasar modal itu disertai dengan tingkat bunga yang tinggi, sebesar 4-5 persen. Hal ini memicu penyedotan finansial secara tidak langsung: aset PTPN berkurang secara gradual karena mesti membayar bunga pinjaman yang tinggi dari bank komersial dan pasar modal. Uang yang harusnya diputar kembali untuk menyediakan layanan pinjaman kepada anak muda malah justru tersedot oleh institusi finansial mapan seperti bank komersial dan pasar modal.

Di sisi yang lain, pinjaman mahasiswa/I yang ditawarkan oleh PTPTN hanya memasang tingkat bunga sebesar 1 persen. Ketidakseimbangan ini menyebabkan kekacauan karena PTPTN harus menanggung beban bunga yang cukup besar, di sisi yang lain nilai pengembalian dari mahasiswa/I tidak sebanding dengan bunga itu (Wan, 2020). Dua hal itu mengakibatkan kas PTPTN tidak seimbang. Pinjaman dari pasar modal terus membengkak, namun pendapatan dari pengembalian pinjaman tetap tidak cukup menutupi modal awal tersebut. Padahal, sampai tahun 2020, utang PTPTN sudah mencapai RM40 milyar dengan kewajiban bunga sebesar RM13 milyar. Proses bisnis yang irasional ini membuat PTPTN terbenam dalam lingkaran setan: PTPTN terus-menerus meminjam uang dari bank komersial untuk menutup hutang dan bunga tersebut sembari membagi alokasi pinjaman dari pasar modal itu untuk distribusi *student loan* kepada mahasiswa/I baru setiap tahun (Wan, 2020).

Masalah proses bisnis yang tidak sehat ini berkaitan dengan problem kedua yakni tingkat pengembalian rendah. Data internal PTPTN pada tahun 2019 menyebutkan bahwa dari 100 persen peminjam, hanya 49% yang dapat digolongkan sebagai peminjam yang bertanggung jawab; 26% (499 ribu peminjam) sanggup menyelesaikan hutangnya, sedangkan 23% (438 ribu peminjam) masih dalam proses pembayaran pinjaman (Wan, 2020). Sisanya, yaitu sebanyak 51%, dinyatakan *default* atau tidak mampu membayar pinjaman; persentase itu terdiri dari 616 ribu peminjam (32%) yang tidak membayar secara rutin dan sebanyak 356 ribu peminjam (19%) yang belum membayar sama sekali (Wan, 2020). Dari survei yang dilakukan oleh PTPTN ditemukan tiga alasan mengapa kasus *default* itu bisa melambung tinggi: tidak memiliki penghasilan tetap (29,1%), tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar pinjaman (28,8%), dan komitmen finansial lain yang terlalu tinggi sehingga tidak memungkinkan bagi mereka membayar hutang (28,3%) (Wan, 2020).

Hal itu terjadi karena mayoritas peminjam PTPTN tidak bisa mendapat pekerjaan yang layak. Dari semua responden yang mengembalikan survei PTPTN, sebanyak 87,7% mengaku mendapat pendapatan di bawah RM4.000 per bulan setelah lulus. Di Malaysia, dengan pendapatan seperti itu, peminjam PTPTN masuk ke dalam kategori B40. Menurut survei internal PTPTN, hampir semua peminjam yang ketika lulus terjun ke kelompok B40 tidak mengembalikan uang pinjaman. Dari semua peminjam yang tidak membayar, B40 menyumbang 97 persen. Berdasarkan survei tersebut, kesulitan finansial tampaknya sangat berpengaruh dalam kemampuan peminjam untuk mengembalikan hutangnya. Peminjam tidak membayar bukan karena mereka malas atau kurang disiplin, tapi karena kondisi pasar tenaga kerja (terbatasnya pekerjaan berkualitas dengan gaji tinggi) dan keadaan ekonomi (ketidakseimbangan antara *real wage* dan inflasi) (Wan, 2020).

Analisis temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *student loan* di kedua negara mencerminkan paradoks negara kesejahteraan kontemporer: negara berupaya memperluas akses pendidikan tinggi tanpa meningkatkan investasi publik, tetapi justru mengalihkan risiko sistemik kepada individu, sehingga pendidikan tinggi semakin berfungsi sebagai mekanisme reproduksi stratifikasi sosial dalam masyarakat kredensial, alih-alih sebagai sarana mobilitas sosial (Collins, 2019; Barr et al., 2017; Chapman, 1997, 2013; Chapman & Dearden, 2017; Chapman & Hicks, 2018).

Simpulan

Model ICL dan TBRL memiliki tiga perbedaan utama: durasi pinjaman, bunga pinjaman, dan batas gaji. Pada sistem ICL, durasi pinjaman umumnya lebih lama (30 tahun) dibanding TBRL yang biasanya mempunyai durasi pinjaman lebih pendek (10 tahun); pada aspek bunga pinjaman, sistem ICL menetapkan besaran bunga yang lebih rendah daripada sistem TBRL; dilihat dari dimensi batas gaji, model ICL memasang batas gaji (*salary cap*) pembayaran pinjaman, sedangkan sistem TBRL tidak mengenal batas gaji. Implementasi sistem ICL di Australia dan TBRL di Malaysia menimbulkan finansialisasi pendidikan tinggi dan penyedotan finansial (*financial expropriation*) yang mempengaruhi keputusan finansial mahasiswa/I di masa depan, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, dan memperburuk kesehatan mental. Di masa depan, penelitian mengenai implementasi dan dampak kebijakan kredit pendidikan di negara lain, khususnya di negara Asia Tenggara lainnya yang memiliki kesamaan karakter dengan Indonesia, sangat diperlukan karena peran strategis pendidikan tinggi dalam diskursus dan praktik pembangunan di kawasan Asia Tenggara. Secara khusus, penelitian ke depan dapat menganalisis lebih jauh komparasi kebijakan dengan memakai data empiris sebab kajian ini memiliki keterbatasan pada dua aspek tersebut.

Rujukan

- Apap, V., Hawley, S., & Smiley, S. (2023). Freezing HECS-HELP indexation won't put more money in your pocket in the short term. *ABC News*. <https://www.abc.net.au/news/2023-04-19/hecs-indexation-explainer/102237170>
- Arwildayanto, L. N., & Rosadi, A. A. (2019). Transparency of education financing management at high school in Gorontalo City. *International Journal of Innovation, Creativity, and Change*, 5(1).
- Barr, N. (2011). Financing Higher Education: Lessons from Economic Theory and Operational Experience. In Financing *Higher Education and Economic Development in East Asia* (pp. 25–48). The Australian University Press.
- Barr, N., Chapman, B., Dearden, L., & Dynarski, S. (2017). Getting Student Financing Right in the US: Lessons from Australia and England. *Centre for Global Higher Education, Working Paper Series*.
- Best, J., & Best, E. (2014). *The Student Loan Mess*. The University of California Press.
- Busemeyer, M. R. (2009). Social democrats and the new partisan politics of public investment in education. *Journal of European Public Policy*, 16(1), 107–126. <https://doi.org/10.1080/13501760802453171>
- Busemeyer, M. R., Franzmann, S. T., & Garritzmann, J. L. (2013). Who Owns Education? Cleavage Structures in the Partisan Competition over Educational Expansion. *West European Politics*, 36(3), 521–546. <https://doi.org/10.1080/01402382.2012.753703>
- Chapman, B. (1997). Conceptual Issues and the Australian Experience With Income Contingent Charges for Higher Education. *The Economic Journal*, 107(442), 738–751. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.1997.tb00039.x>
- Chapman, B. (2013). Reinventing Student Loans: Paying What You Can. *Solutions*, 4(5).
- Chapman, B., & Dearden, L. (2017). Conceptual and Empirical Issues for Alternative Student Loan Designs: The Significance of Loan Repayment Burdens for the United States. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 671(1), 249–268. <https://doi.org/10.1177/0002716217703969>
- Chapman, B., & Hicks, T. (2018). The political economy of the Higher Education Contribution Scheme. In B. Cantwell, H. Coates, & R. King (Eds.), *Handbook on the Politics of Higher Education*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781786435026.00023>
- Chapman, B., & Ryan, C. (2005). The access implications of income-contingent charges for higher education: Lessons from Australia. *Economics of Education Review*, 24(5), 491–512. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2004.08.009>
- Collins, R. (2019). *The credential society: An historical sociology of education and stratification*. Columbia University Press.
- Edmiston, K. D., Brooks, L., & Shepelwich, S. (2013). Student loans: overview and issues. Federal Reserve Bank of Kansas City Working Paper, (12-05).
- Edward Wong, S. K., Nasharuddin, A., & Ismail, K. (2015). Education Loan Repayment and Performances: The Malaysian Graduates Perspectives. *Journal of Southeast Asian Studies*, 20(1), 158–172. <https://doi.org/10.22452/jati.vol20no1.10>
- Elmira, E., Budhi Adrianto, & Suryadarma, D. (with Social Monitoring and Early Response Unit (Indonesia)). (2018). Financing higher education in Indonesia: Assessing the feasibility of an income-contingent loan system. SMERU Research Institute.
- Fischer, F., Miller, G., & Sidney, M. S. (Eds.). (2007). *Handbook of public policy analysis: Theory, politics, and methods*. CRC/Taylor & Francis.
- Garritzmann, J. L. (2016). The Political Economy of Higher Education Finance: The Politics of Tuition Fees and Subsidies in OECD Countries, 1945–2015. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-29913-6>
- Gupta, K. (2012). Comparative Public Policy: Using the Comparative Method to Advance Our Understanding of the Policy Process. *Policy Studies Journal*, 40(s1), 11–26. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2012.00443.x>
- Haneza Ab Hamid. (2021). Financing Higher Education in Malaysia: PTPTN and Issues. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36547.32808>
- Hegarty, N. (2023). Student Debt Indexation to Have Lifelong Impacts on Australians' Borrowing Capacity. *ABC News*. <https://www.abc.net.au/news/2023-05-31/hecs-student-debt-indexation-borrowing-capacity-futurity-study/102409826>
- Investment, F. (2023). *Financial and Social Impact of the Cost of University Education Report*. Futurity Investment Group.
- Kenayathulla, H. B., & Tengyue, Z. (2016). Student Loans In Malaysia And China: Equity, Efficiency And Adequacy. *Malaysian Online Journal of Educational Management*, 4(1), 64–85. <https://doi.org/10.22452/mojem.vol4no1.5>

-
- Lapavitsas, C. (2009). Financialised Capitalism: Crisis and Financial Expropriation. *Historical Materialism*, 17(2), 114–148. <https://doi.org/10.1163/156920609X436153>
- Lapavitsas, C., & Powell, J. (2013). Financialisation varied: A comparative analysis of advanced economies. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 6(3), 359–379. <https://doi.org/10.1093/cjres/rst019>
- Lapavitsas, K. (2013). *Profiting without producing: How finance exploits us all*. Verso.
- Lazzarato, M., Lazzarato, M., & Lazzarato, M. (2012). *The making of the indebted man: An essay on the neoliberal condition* (J. D. Jordan, Trans.). Semiotext(e).
- Maguire, D. (2023). HECS-HELP indexation is forecast to be higher this year. Is it still a “good debt”? *ABC News*. <https://www.abc.net.au/news/2023-04-13/hecs-help-student-debt-university-fees-indexation-date-june-1/102179432>
- Marginson, S. (2016). The worldwide trend to high participation higher education: Dynamics of social stratification in inclusive systems. *Higher Education*, 72(4), 413–434. <https://doi.org/10.1007/s10734-016-0016-x>
- Martinenghi, F. I. (2021). *Increasing the price of a university degree does not significantly affect enrolment if income contingent loans are available: Evidence from HECS in Australia* (Version 1). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2102.03956>
- O’Flaherty, A., & Hamilton-Smith, L. (2023). University students relying on food banks, skipping meals as cost of living bites. *ABC News*. <https://www.abc.net.au/news/2023-03-27/university-uq-food-crisis-cost-of-living-student-food-cut/102137568>
- University of London, & Lapavitsas, C. (2009). Financialisation, or the search for profits in the sphere of circulation. *Ekonomiaz. Revista Vasca de Economía*, 72(3). <https://doi.org/10.69810/ekz.0989>
- Wan Jan, W. S. (2020). *Malaysia’s Student Loan Company: Tackling the PTPTN Time Bomb*. ISEAS Publishing. <https://doi.org/10.1355/9789814881685>
- Zaki, A., Hapsari, N. R., Koraag, S. T. G., Mu’afi, M. I., & Rahmawati, K. (2023). Analisis Pertumbuhan Digital Entrepreneurship Startup Fintech Pada Segmentasi Produk Student Loan Indonesia. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan*, 27(1), 82. <https://doi.org/10.31315/paradigma.v27i1.8991>